

RENCANA KERJA TAHUN 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan acuan perencanaan SKPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Rencana Kerja Tahun 2023 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023. Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok RENJA tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Benteng, 11 Maret 2022

KEPALA DINAS,

Drs. ANDI MASSAILE
NIP. 19650806 199402 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	36
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	41
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	42
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	43
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	44
3.3. Program dan Kegiatan	45
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..	46
BAB V PENUTUP	47

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 (T.C29)	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Petrangkat Daerah s/d Tahun 2020	8
Tabel 2.2 (T.C30)	Rumusan rencana Program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2022	37
Lampiran	Rencana Kerja Tahun 2023	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu

RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Renstra DP3AP2KB memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja) yang disusun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada DP3AP2KB, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) DP3AP2KB dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mengacu pada RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar dan berpedoman pada Renstra Tahun 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 9271);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 28);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 25);
 13. Instruksi Bupati Nomor 059/17.a/Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang Inklusif;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 109 Tanggal 30 Desember 2021);
 15. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 144 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 695 Tanggal 31 Desember 2021).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja DP3AP2KB dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mengacu pada RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar dan berpedoman pada Renstra Tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja DP3AP2KB adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Menetapkan program dan kegiatan DP3AP2KB Tahun 2023;
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DP3AP2KB;
4. Memberikan acuan dalam penngendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan DP3AP2KB.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perangkat Daerah DP3AP2KB Tahun 2023 disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II. HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Renja DP3AP2KB merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Renstra DP3AP2KB. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan suatu pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Seiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja DP3AP2KB Tahun 2021 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja 2021 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Rekapitulasi hasil pelaksanaan renja DP3AP2KB dan pencapaian Renstra s/d Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel T- C. 29.

Realisasi program dan kegiatan tahun 2021 sebagai berikut :

Pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 yang didukung dengan dana APBD Kabupaten Kepulauan Selayar dilaksanakan melalui dua urusan yaitu :

- a. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- b. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

A. Pendapatan

Dalam tahun anggaran 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar, tidak mengelola Pendapatan.

B. Belanja Operasi

Belanja Operasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar, dianggarkan sebesar Rp. 9.566.900.390,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.035.735.452,- atau 83,99% dengan rincian belanja sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 3.796.620.090,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.661.607.774,- atau 96,44%.
- b. Belanja Barang Jasa dianggarkan sebesar Rp. 4.781.351.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.607.582.378,- atau 75,45%.
- c. Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp. 203.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 203.000.000,- atau 100%.

C. Belanja Modal

Belanja Modal Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar, dianggarkan sebesar Rp. 785.929.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 563.545.300,- atau 71,70%.

Dari kelompok Belanja Operasi tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan alokasi anggaran Rp. 4.646.958.590,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.458.161.990,- atau 95,94% dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dan sub kegiatan dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 19.264.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.581.000,- atau 65,31 % dari alokasi anggaran ;

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan output tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah, dengan alokasi anggaran Rp. 19.264.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.581.000,- atau 65,31 %.

- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 3.762.780.090,- dan terealisasi sebesar Rp 3.635.389.774,- atau 96,61% dari alokasi anggaran;
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan output tersedianya gaji dan tunjangan ASN, alokasi anggaran Rp. 3.750.580.090,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.619.347.774,- atau 96,50 %.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan output Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, alokasi anggaran Rp. 12.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.692.000,- atau 71,25 %.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan output Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 7.350.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.350.000,- atau 100 %.
- c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 299.460.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 283.775.879,- atau 94,76% dari alokasi anggaran;
- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan output Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, alokasi anggaran Rp. 1.998.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.998.000,- atau 100 %.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan output Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor, alokasi anggaran Rp.

60.940.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 60.940.000,- atau 100 %.

- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan output Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan, alokasi anggaran Rp. 24.375.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.815.700,- atau 89,50 %.
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan output Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, alokasi anggaran Rp. 2.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.400.000,- atau 100 %.
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan output Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, alokasi anggaran Rp. 209.747.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 196.622.179,- atau 93,74 %.

d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 416.773.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 400.032.662,- atau 95,98 % dari alokasi anggaran.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan output Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, alokasi anggaran Rp. 70.277.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 54.524.322,- atau 77,58 %.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan output Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor, alokasi anggaran Rp. 346.496.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 345.508.340,- atau 99,71 %.
- e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 148.680.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 126.382.675,- atau 85,00 % dari alokasi anggaran.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan output dengan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, alokasi anggaran Rp. 114.960.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 100.978.674,- atau 87,84 %.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan output Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi anggaran Rp. 13.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.384.000,- atau 53,51 %.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan output Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, alokasi anggaran Rp. 19.920.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 18.020.000,- atau 90,46 %.

2) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Pembangunan, dengan alokasi anggaran Rp. 232.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 220.248.200,- atau 94,93% dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dan sub kegiatan dari Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan adalah sebagai berikut :

- a) Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, alokasi anggaran Rp. 31.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.500.000,- atau 79,03 % dari alokasi anggaran ;
 - Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG, outputnya adalah Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG bagi Organisasi Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, alokasi anggaran Rp. 24.850.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.500.000,- atau 98,59 %.
- b) Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi, alokasi anggaran Rp. 26.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.25.050.000,- atau 96,35 % dari alokasi anggaran ;
 - Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi, outputnya adalah Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan

Kabupaten/Kota, alokasi anggaran Rp. 26.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 25.050.000,- atau 96,35 %.

c) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, alokasi anggaran Rp. 175.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.170.698.200,- atau 97,54 % dari alokasi anggaran ;

- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, outputnya adalah Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, alokasi anggaran Rp. 175.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 170.698.200,- atau 97,54%.

3) Program Perlindungan Perempuan

Program Perlindungan Perempuan bertujuan untuk Meningkatkan Perlindungan terhadap perempuan, alokasi Anggaran Rp. 31.000.000,- dan Terealisasi Rp.29.347.000,- atau 94,67 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dan sub kegiatan dari Program Perlindungan Perempuan adalah sebagai berikut:

- a) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, alokasi anggaran Rp. 31.000.000,- dan terealisasi Rp. 29.347.000,- atau 94,67 % dari alokasi anggaran;
- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota, outputnya yaitu

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota, alokasi anggaran Rp. 31.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 29.347.000,- atau 94,67%.

4) Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program Peningkatan Kualitas Keluarga bertujuan untuk Meningkatkan Kualitas Keluarga, alokasi Anggaran 46.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 44.580.000,- atau 96,91 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dan sub kegiatan dari Program Peningkatan Kualitas Keluarga adalah sebagai berikut:

a) Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi anggaran Rp. 46.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 44.580.000,- atau 96,91 % dari alokasi anggaran;

- Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, outputnya yaitu Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, alokasi anggaran Rp. 46.000.000,- dan terealisasi sebesar 44.580.000,- atau 96,91 %.

5) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Alokasi Anggaran Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak adalah Rp.10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.600.000,- atau 96,00 % dari alokasi anggaran. Adapun rincian kegiatan dan sub kegiatan dari Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak adalah sebagai berikut :

a) Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian data Gender dan Anak dalam Kelembagaan data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi anggaran Rp. 10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.600.000,- atau 96,00 % dari alokasi anggaran.

- Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, outputnya adalah Tersedianya Data Gender dan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, alokasi anggaran Rp. 10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.600.000,- atau 96,00%.

6) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program pemenuhan Hak anak (PHA) dengan tujuan pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah dan dunia usaha di tingkat kabupaten dengan alokasi anggaran Rp.49.466.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 49.071.001,- atau 92,20% dari alokasi anggaran. Adapun rincian kegiatan dan sub kegiatan dari Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) adalah sebagai berikut ;

- a) Kegiatan Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp.21.740.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.625.000,- atau 99,47% dari alokasi anggaran.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota, outputnya adalah Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota, alokasi anggaran Rp.21.740.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.625.000,- atau 99,47%.

- b) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp.27.726.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 27.446.001,- atau 98,99% dari alokasi anggaran.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, outputnya adalah Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, alokasi anggaran Rp. 10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- atau 100%.
 - Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, outputnya adalah Tersedianya Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, alokasi anggaran Rp. 17.726.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.446.000,- atau 98,42%.

7. Program Perlindungan Khusus Anak

Program Perlindungan Khusus Anak dengan alokasi anggaran Rp. 15.510.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.510.000,- atau 100% dari alokasi anggaran. Adapun rincian kegiatan dan sub kegiatan dari Program Perlindungan Khusus Anak adalah sebagai berikut :

- a) Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp. 15.510.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.510.000,- atau 100% dari alokasi anggaran.
- Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, output Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, alokasi anggaran Rp15.510.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.510.000,- atau 100% .

8. Program Pengendalian Penduduk

Program Pengendalian Penduduk dengan alokasi anggaran Rp.72.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 56.545.001,- atau 78,53% dari alokasi anggaran. Adapun rincian kegiatan dan sub kegiatan dari Program Pengendalian Penduduk adalah sebagai berikut :

- a) Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk dengan alokasi anggaran Rp. 31.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.560.000,- atau 79,23% dari alokasi anggaran.
- Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD.MI dan SLTP/MTS, Jalur Formal dan Informal, outputnya adalah terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal

di Satuan Pendidikan Jenjang SD.MI dan SLTP/MTS, Jalur Formal dan Informal, alokasi anggaran Rp. 31.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.560.000,- atau 79,23% .

b) Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupten/Kota dengan alokasi anggaran Rp. 41.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 31.985.001,- atau 78,01% dari alokasi anggaran.

- Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga, outputnya adalah terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga, alokasi anggaran Rp. 15.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.730.000,- atau 51,53% .

- Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB, outputnya adalah terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB, alokasi anggaran Rp. 26.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.255.000,- atau 93,29% .

9. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga berencana dengan alokasi anggaran Rp. 4.224.730.000,- dari terealisasi Rp. 3.054.432.263,- atau 72,30% dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dan sub kegiatan dari Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) adalah sebagai berikut:

a) Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan

Budaya Lokal dengan alokasi anggaran Rp. 986.170.000,- dan teeralisasi Rp 848.345.463,- atau 82,02% dari alokasi anggaran;

- Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang, outputnya adalah terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang, alokasi anggaran Rp. 168.562.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 141.001.800,- atau 83,65% .
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK, outputnya adalah terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana), alokasi anggaran Rp. 817.608.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 707.343.663,- atau 86,51%
- b) Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dengan alokasi anggaran Rp. 1.174.849.000,- dan terealisasi sebesar Rp 952.465.000,- atau 81,07% dari alokasi anggaran;
- Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB, outputnya adalah Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB, alokasi anggaran Rp. 395.449.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 173.065.000,- atau 43,76% .

- Sub Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB), outputnya adalah terlaksananya Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB), alokasi anggaran Rp. 195.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.195.000.000,- atau 100%.
 - Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), outputnya adalah terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), alokasi anggaran Rp. 584.400.000,- dan terealisasi Rp. 584.400.000,- atau 100%.
- c) Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp. 790.663.000,- dan teeralisasi Rp 280.507.800,- atau 35,48% dari alokasi anggaran;
- Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya, outputnya adalah Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya,

alokasi anggaran Rp. 27.405.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.476.000,- atau 78,37% .

- Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB, outputnya adalah Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB, alokasi anggaran Rp. 8.250.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 750.000,- atau 9,097% .
- Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), outputnya adalah Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) , alokasi anggaran Rp. 698.008.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 73.390.000,- atau 10,51% .
- Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB, outputnya adalah Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB , alokasi anggaran Rp. 140.790.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 140.790.300,- atau 100% .
- Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak, outputnya adalah Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak, alokasi anggaran Rp. 56.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 44.101.500,- atau 78,75% .

d) Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

dengan alokasi anggaran Rp. 567.248.000,- dan terealisasi Rp 449.785.000,- atau 79,29% dari alokasi anggaran;

- Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB, outputnya adalah Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Kampung KB, alokasi anggaran Rp. . 567.248.000,- dan terealisasi Rp 449.785.000,- atau 79,29%.

10. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

(KS)

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) bertujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan Keluarga Sejahtera (KS), dengan alokasi anggaran Rp. 705.800.000,- dan terealisasi Rp. 523.329.000,- atau 74,15% dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dan sub kegiatan dari Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) adalah sebagai berikut:

- a) Kegiatan Pelaksanaan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan alokasi anggaran Rp. 705.800.000,- dan terealisasi Rp. 523.329.000,- atau 74,15% dari alokasi anggaran.
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS), outputnya adalah Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R

dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS), alokasi anggaran Rp. 53.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 53.000.000,- atau 100% .

- Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)), outputnya yaitu Terlaksananya Orientasi/Pelatihan teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS), alokasi anggaran Rp. 37.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 36.814.000,- atau 95,50% .
- Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga), outputnya yaitu Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga, alokasi anggaran Rp. 615.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 433.515.000,- atau 70,40% .

secara umum capaian kinerja DP3AP2KB pada Tahun 2021 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Tahun 2016-2021. Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan DP3AP2KB. Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DP3AP2KB

Tahun 2021, maka dapat dikatakan bahwa DP3AP2KB dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori ” baik ” yaitu dengan nilai 83,99 %.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja Pelayanan kinerja daerah disertai fakDP3AP2KB sebagaimana hasil evaluasi RPJMD dan Evaluasi Renstra PD. Adapun Indikator Kinerja Daerah Perangkat Daerah dilakukan dengan evaluasi pencapaian indikator DP3AP2KB beserta target kinerjanya dapat dilihat pada Tabel T-C.30 sebagai berikut :

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 5 terdiri dari:

a. Indek pembangunan Gender

1. Faktor pendorong indikator tersebut adalah tingginya angka harapan hidup perempuan sebagai salah satu indikator IPG
2. Faktor penghambat adalah masih rendahnya penghjasilan perempuan dan harapan lama sekolah bagi perempuan
3. Rekomendasi dan tindak lanjut review target RPJMD

b. Persentase perempuan dan anak korban kekerasan

1. Faktor pendorong adalah kerjasama jejaring dalam pendampingan penanganan kasus
2. Faktor penghambat adalah keterbatasan dan kemampuan petugas pendamping
3. Rekomendasi dan tindak lanjut penguatan kapasitas pendampingan korban dan peluasan jejaring

c. Prefalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan

1. Faktor pendorong kerjasama jejaring dalam penanganan kasus
2. Faktor penghambat adalah keterbatasan dan kemampuan petugas pendamping

3. Rekomendasi dan tindak lanjut penguatan kapasitas pendampingan korban dan peluasan jejaring

d. Presentase penyediaan data mikro keluarga di desa

1. Faktor pendorong adanya kegiatan pendataan dan updating data keluarga
2. Faktor penghambat lemahnya sistem pelaporan dan administrasi di tingkat RT
3. Rekomendasi dan tindak lanjut pelaksanaan pendataan dan adanya perda tentang pengendalian penduduk dan KB

e. Presentase pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 th

1. Faktor pendorong - Terintegrasinya BKR dan PIK Remaja - Peningkatan kursus calon pengantin oleh lintas sektoral - Pengembanagan life skill bagi remaja dalam penyiapan kehidupan berkeluarga
2. Faktor penghambat masih kurangnya SDM pengelola program KKBPk dalam memberikan advokasi pada masyarakat dan masih adanya aturan yang berbeda antar opd
3. Rekomendasi dan tindak lanjut melakukan promosi KIE melalui media cetak elektronik

2. Capaian indikator dengan status tercapai ada .6. terdiri dari:

a. Presentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah

1. Faktor pendorong meningkatnya harapan lama sekolah bagi perempuan

2. Faktor penghambat partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah dipengaruhi peluang seleksi

b. Presentase perempuan dan anak korban kekerasan

1. Faktor pendorong kerjasama jejaring dalam penanganan kasus
2. Faktor penghambat adalah keterbatasan dan kemampuan petugas pendamping
3. Rekomendasi dan tindak lanjut penguatan kapasitas pendampingan korban dan peluasan jejaring

c. Rasio perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja Perangkat Daerah

1. Faktor pendorong adanya bimtek penyusunan ARG
2. Faktor penghambat masih kurangnya pemahaman petugas dalam penyusunan ARG

d. Angka kelahiran remaja usia 15 sampai 19 th (ASFR 15- 19 Th)

1. Faktor pendorong kecilnya kelahiran pada kelompok umur 15-19 th
2. Faktor penghambat belum tersedianya data ASFR setiap tahun
3. Rekomendasi dan tindak lanjut pendataan tiap tahunnya

e. Presentase PUS yang memakai kontrasepsi

1. Faktor pendorong tingginya kesadaran masyarakat untuk berKB
2. Faktor penghambat tidak semua masyarakat dengan keyakinan tertentu menerima kontrasepsi

f. Presentase keberhasilan pemakaian kontrasepsi MKJP

1. Faktor pendorong tingginya animo masyarakat dalam penggunaan alkon implan
2. Faktor penghambat - masih tingginya rumor kegagalan IUD - belum semua tenaga pelayanan MOP bersertifikat - biaya pelayanan tinggi
3. Presentase pasangan usia subur yang ingin berKB tidak terpenuhi/unmetneed
 - a. Faktor pendorong meningkatnya KIE kepada masyarakat
 - b. Faktor penghambat rendahnya pemahaman batasan pasangan usia subur (PUS) bisa hamil (merasa tua tidak perlu KB)
4. Presentase keluarga sejahtera
 1. Faktor pendorong - Meningkatnya faktor ekonomi sosial dan pendidikan dalam keluarga - Tingkat sosial dan kepedulian yang tinggi
 2. Faktor penghambat masih lemahnya pemahaman masyarakat untuk indikator keluarga sejahtera

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DP3AP2KB didasarkan pada indikator kinerja daerah dengan status upaya keras dan permasalahan/hambatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DP3AP2KB.

Isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi perempuan di bidang politik dan pemerintahan yang masih rendah
2. Tenaga kerja dibawah umur yang semakin tinggi

3. Peran kelembagaan perlindungan hak perempuan dan anak yang belum optimal sehingga upaya pencegahan dan deteksi dini masih relatif kurang dibandingkan aspek penanganan kasus;
4. Belum seimbangnya antara jumlah penyuluh dengan jumlah desa
5. Rendahnya rasio akseptor KB baru dan cakupan peserta KB aktif

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Sebagaimana amanat Permendagri 90 Tahun 2019 Pasal 5 : Dalam menyusun neraca, laporan realisasi anggaran, dan laporan operasional tahun anggaran 2021, Pemerintah Daerah melakukan pemetaan program dan kegiatan menurut Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 8: Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang telah digunakan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi, kabupaten/kota dan yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku tetap digunakan dan dilakukan penyesuaian secara bertahap mulai tahun 2020.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kabupaten, Provinsi maupun kebijakan Nasional. Program prioritas pembangunan DP3AP2KB Tahun 2023 guna menunjang Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
3. Program Perlindungan Perempuan
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
6. Program Pemenuhan Hak Anak
7. Program Perlindungan Khusus Anak
8. Program Pengendalian Penduduk
9. Program Pembinaan Keluarga Berencana
10. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan visi misi yang ditetapkan.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Renja DP3AP2KB Tahun 2023 adalah implementasi Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai berikut :

1. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan
2. Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
4. Mengembangkan pengelolaan potensi kelautan
5. Meningkatkan pembinaan kehidupan sosial dan keagamaan
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, DP3AP2KB mendukung pencapaian misi ke-1, misi ke-2 dan misi ke-3.

Misi ke-1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan. Tujuan 1 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah, sasaran 1 : Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan, yaitu Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Misi ke-2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan, tujuan 2 : Meningkatkan Kapasitas dan Fasilitas Perdesaan, sasaran 3 : Meningkatnya Kapasitas SDM dan Fasilitas Perekonomian Perdesaan, yaitu Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

Misi ke-3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, tujuan 3 : Meningkatnya Fasilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sasaran 4 : Meningkatnya Pemenuhan Dasar Masyarakat, yaitu Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Sasaran Renja DP3AP2KB adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel;
2. Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang efektif dan efisien;
3. Berkurangnya penduduk miskin;
4. Meningkatnya daya beli masyarakat;
5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

6. Meningkatnya kualitas keluarga, keberdayaan dan peran perempuan dalam pembangunan.

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program dapat juga diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Jumlah program yang diusulkan Tahun Anggaran 2023 adalah 10 program dengan 29 kegiatan dan 121 sub kegiatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DP3AP2KB

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi yang dioperasionalkan melalui strategi dan kebijakan, maka rencana kerja kedepan berdasarkan urusan dan indikator kinerja kunci (IKK) yang tercantum pada RPJMD 2021-2026.

Salah satu faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah pencapaian visi dan misi kepala daerah, pemberantasan kemiskinan dan pendayagunaan potensi daerah.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan adalah :

1. Jumlah program dan jumlah kegiatan
2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaan

BAB V

PENUTUP

Renja sebagai pedoman bagi pemerintah di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Kaidah- kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. DP3AP2KB berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renja DP3AP2KB serta diselaraskan dengan RKPD Tahun 2023;
 - b. DP3AP2KB berkewajiban menyusun RKA Tahun 2023 dengan berpedoman kepada Renja ;
 - c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Tahun 2023, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan.
3. Rencana Tindak Lanjut

Renja selain sebagai pedoman pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun 2023 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja DP3AP2KB. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2023 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam

memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu Renja juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja DP3AP2KB dan Hasil Pencapaian renstra s/d 2021

NO	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	
				K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
1				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 11/6 *100%		14 = 12/5 *100%	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																					
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja (%)	72,31	600,689,366	100	6,005,688,366	9.46	567,940,805	34.85	2,093,178,729	50.34	3,023,441,408	802.27	4,556,401,989	94.65	5,684,560,942	94.65	5,684,560,942	0.95	0.95	1.31	9.46
	Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100	0																		
	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan		Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%)	95,00	0																		
	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	130,000,000	100	130,000,000	0	0	2.16	2,812,800	3.46	4,492,800	65.31	12,581,000.00	65.31	12,581,000	65.31	12,581,000	0.65	0.10	0.10	0.10
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun	6 Dok	4,049,437,081	7 Dokumen	15,000,000	0	0	4 dok	2,812,800	5 Dok	4,492,800	5 Dok	12,581,000.00	5	12,581,000	5	12,581,000	0.71	0.84	0.83	0.00
	Meningkatnya ketersediaan administrasi keuangan perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah	100	4,049,437,081	100	3,909,100,000	13.90	543,370,402	46.32	1,810,770,052	65.61	2,564,955,925	669.04	3,635,389,774	65.61	3,635,389,774	65.61	3,635,389,774	0.66	0.93	0.66	0.90

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan	41 org	3,919,437,081	100	3,893,100,000	5,54	543,370,402	18,26	1,807,673,252	25,86	2,559,129,925	37,83	3,619,347,774.00	37,83	3,619,347,774	37,83	3,619,347,774	c	0.93	0.63	0.92
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyuluh KB yang dinilai angka kreditnya	19 org	25,000,000	20 Orang	11,000,000	0	0	19 org	1,616,800	19 org	4,346,000	19 org	8,692,000.00	19 org	8,692,000	19 org	8,692,000	0.95	0.79	1.00	0.35
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Yang disusun Secara Tepat, Akurat Dan Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1 laporan	25,000,000	1 laporan	5,000,000	0	0	1 laporan	1,480,000	1 laporan	1,480,000	1 laporan	7,350,000.00	1 laporan	7,350,000	1 laporan	7,350,000	1.00	1.47	1.00	0.29
Meningkatnya ketersediaan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi umum	100	368,500,000	12 Bulan	220,440,100	400,000	55,749,999	96,943,079	-	283,775,879	0	283,775,879	0	283,775,879	0	283,775,879	0.00	1.29	0.00	0.77		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 jenis	30,000,000	12 Bulan	1,998,000	0	0	6 bln	971,500	9 bln	1,998,000	12 bln	1,998,000	12 bln	1,998,000	12 bln	1,998,000	1.00	1.00	1.00	0.07	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung kantor Yang Tersedia	10 jenis	70,000,000	6 Unit	24,980,000	0	0	0	0	0	0	6 Unit	60,940,000	6 Unit	60,940,000.00	6 Unit	60,940,000.00	1.00	2.44	0.87	0.87	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	3 jenis	40,000,000	12 Bulan	14,005,100	3 bln	400,000	6 bln	4,804,800	9 bln	8,101,600	12 Bln	21,815,700.00	12 Bln	21,815,700	12 Bln	21,815,700	1.00	1.56	1.20	0.55	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	2 jenis	3,500,000	12 Bulan	1,800,000	0	0	6 bln	600,000	9 bln	600,000	12 Bln	2,400,000	12 Bln	2,400,000	12 Bln	2,400,000	1.00	1.33	6.00	0.69	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Keluar Daerah	355 SPD	165,000,000	1 Tahun	177,657,000	0	0	6 bln	49,373,699	9 bln	86,243,479	12 Bln	196,622,179.00	12 Bln	196,622,179	12 Bln	196,622,179	1.00	1.11	1.00	1.19	

Tersedianya Pemenuhan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	1,062,092,959	100	467,257,900	100	15,245,563	50	190,729,059	75	286,814,356	95	498,272,662	95	400,032,662	95	400,032,662	0.95	0.86	95.00	0.38
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	3 jenis	94,461,285	12 Bulan	69,764,100	0	0	6 bln	24,999,000	9 bln	43,957,500	12 bln	98,240,000	12 bln	98,240,000	12 bln	98,240,000	1.00	1.41	4.00	1.04
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan telepon, listrik dan air yang tersedia	3 layanan	35,000,000	3 Jasa	70,277,800	3 Jasa	14,613,223	3 jasa	27,914,319	3 Jasa	40,252,816	3 Jasa	54,524,322.00	3 Jasa	54,524,322	3 Jasa	54,524,322	1.00	0.78	1.00	1.56
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	1 Tahun	327,216,000	3 bln	632,340	6 bln	162,814,740	9 bln	246,561,540	12 bln	345,508,340.00	12 bln	345,508,340.00	12 bln	345,508,340.00	1.00	1.06	0.00	0.00
Tersedianya Pemenuhan Administrasi Perkantoran	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	348,750,000		145,102,000		8,924,840		33,116,819		70,235,248	-	126,382,674		126,382,674		126,382,674	0.87			0.36
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5 mobil+57 motor	113,750,000	93 Unit	114,960,000	57	8,424,840	57	29,516,819	57	56,479,848	114	100,978,674	171	100,978,674.00	171	100,978,674.00	0.61	0.88	0.92	0.89
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang di pelihara	3 Jenis	40,000,000	20 Unit	10,150,000	6 unit	500,000	10 unit	3,600,000	10 unit	3,600,000	10 unit	7,384,000.00	10 unit	7,384,000.00	10 unit	7,384,000.00	0.50	0.73	3.33	0.18
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 ktr	70,000,000	1 Gedung	19,992,000	0	0	0	0	0	1 Gedung	10,155,400	1 Gedung	18,020,000.00	1 Gedung	18,020,000.00	1 Gedung	18,020,000.00	1.00	0.90	1.00

	Meningkatnya Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD (%)	0.28	147,065,837		232,000,000	0		9,860,000		162,860,000	-	220,248,200		220,248,200		220,248,200		0.95		1.50	
	Meningkatnya Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah kewenangan kabupaten	14,05	77,065,837	50 Orang	31,000,000	0	0	0	6,860,000	0	8,360,000	50 Orang	24,500,000	0	24,500,000	0	24,500,000	0.00	0.79	0.00	0.32
		Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	2	21,000,000	50 Orang	31,000,000	0	0	0	6,860,000	0	8,360,000	50 Orang	24,500,000	50 Orang	24,500,000.00	50 Orang	24,500,000.00	1.00	0.79	25.00	1.17
	Meningkatnya Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di lembaga legislatif daerah	28%	55,000,000	24%	26,000,000	24%	0	24%	3,000,000	24%	4,500,000	24	25,050,000	24	25,050,000	24	25,050,000	100.00	0.96	85.71	0.46
		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan yang di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	2	30,000,000	40 persen	26,000,000	0	0	1	3,000,000	1	4,500,000	1	25,050,000	1	25,050,000	1	25,050,000	1.00	0.96	0.50	0.84
	Meningkatnya Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kewenangan Kabupaten	87,00	15,000,000		175,000,000	0	0	0		150,000,000	-	170,698,200		170,698,200		170,698,200		0.98		11.38	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dharma wanita)	100%	15,000,000	100%	175,000,000	0	0	0	75	150,000,000	95	170,698,200.00	95	170,698,200.00	95	170,698,200.00	0.95	0.98	95.00	11.38	

2	Menurunnya Rasio Kekerasan terhadap Perempuan	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0.001	30,128,180	0.001	31,000,000	0	0	3,000,000	4,500,000	-	-	29,347,000	29,347,000	0.95	0.97					
	Meningkatkan Layanan Pendampingan Perlindungan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Pendampingan Perlindungan Perempuan	100	20,000,000	100	31,000,000	0	0	3,000,000	4,500,000	-	29,347,000	29,347,000	29,347,000	29,347,000	0.95	1.47				
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kerjasama dalam penyediaan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten	8	20,000,000	10	31,000,000	0	0	8	3,000,000	8	4,500,000	8	29,347,000	8	29,347,000	8	29,347,000	0.80	0.95	1.00
	Meningkatnya kualitas keluarga, kebermanfaatan dan peran perempuan dalam pembangunan	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Keluarga yang Terstandarisasi (%)	10%	22,100,000		46,000,000		0	5,543,000	7,043,000	-	44,580,000	0	7,043,000	0	7,043,000	0.00	0.15	0.00	0.32	
	Meningkatkan Kualitas Keluarga dan Hak Anak	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga	100	22,100,000	100	46,000,000	0	50	5,543,000	65	7,043,000	75	44,580,000	75	7,043,000	75	7,043,000	0.07	0.15	0.75	0.32
		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten	4	22,100,000	11 Kecamatan	46,000,000	0	0	11 Kecamatan	11 Kecamatan	7,043,000	11 Kecamatan	44,580,000.00	11 Kecamatan	7,043,000	11 Kecamatan	7,043,000	1.00	0.15	2.75	0.32

3	Tersedianya Sistem Data Gender dan Anak	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan Layanan Sistem Informasi Gender dan Anak	0.88	21,787,531		10,000,000	0	0	0	0	0	-	19200000	0	19200000	0	19200000	0.00	1.92	0.00	0.88	
	Tersedianya Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten	0,88	21,787,531		10,000,000	0	0	0	0	0	-	9,600,000.00	0	9600000	0	9600000	0.00	0.96	0.00	0.44	
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah data gender dan anak yang tersedia	80%	11,287,531	11 Kecamatan	10,000,000	0	0	0	0	0	11 Kec.	9,600,000.00	11 Kec.	9,600,000.00	11 Kec.	9,600,000.00	1.00	0.96	138.75	0.85	
4	Terjalannya kerjasama antara lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Capaian Pemenuhan Hak Anak (%) (skor indikator KLA)	60,00	35,687,976		66,000,000	0		12,215,000	14,385,000	-	49,071,000	0	49,071,000	0	49,071,000	0.00	0.74	0.00	1.38		
	Meningkatnya PHA yang Terakomodir pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PHA yang Terakomodir pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten	100%	35,687,976	100%	26,000,000	0	45	5,725,000	50	6,125,000	50	21,625,000	50	21,625,000	50	21,625,000	0.50	0.83	50.00	0.61	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten	6 kali	0	4 kali	26,000,000	0	0	1	5,725,000	2	6,125,000	2	21,625,000.00	2	21,625,000.00	2	21,625,000.00	0.50	0.83	0.33	0.00
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	100%	10,000,000	1 Tahun	40,000,000	0	0	16.23	6,490,000	20.65	8,260,000	-	27,446,000	20.65	27,446,000	20.65	27,446,000	20.65	0.69	20.65	2.74

		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan kabupaten	15 kali	0	1 Tahun	10,000,000	0	0	0	0	0	0	-	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0.00	1.00	0.00	0.00
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media Massa (cetak dan elektronik) yang bekerjasama dengan pemerintah kabupaten untuk melakukan KIE Pemenuhan Hak	2	10,000,000	11 Kecamatan	20,000,000	0	0	6,490,000	8,260,000	-	17,446,000.00	0	17,446,000.00	0	17,446,000.00	0.00	0.87	0.00	1.74		
5	Terjalannya kerjasama antara lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha dalam Perlindungan Khusus anak	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kab/Kota	100	66,362,594		26,000,000	0	0	3,860,000	6,660,000	-	-	0	15,510,000	0	15,510,000	0.60			0.23		
	Meningkatnya Peran Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	100	30,000,000		26,000,000	0	0	3,860,000	6,660,000	-	15,510,000	0	15,510,000	0	15,510,000	0.00	0.60	0.00	0.52		
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	3 Kec	15,000,000	100%	26,000,000	0	0	3,860,000	6,660,000	-	15,510,000.00	0	15,510,000	0	15,510,000	0.00	0.60	0.00	1.03		
6	Menurunnya Angka Kelahiran	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR (Angka Kelahiran Total)	2.04	21,787,531		122,000,000	0	0	162,037,000	628,096,500	-	-	0	1,707,317,800	0	1,707,317,800	0.00	13.99	0.00	78.36		

	Meningkatnya Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	0	0	100	31,000,000	0	50	3,000,000	65	4,500,000	75	24,560,000	75	24,560,000	75	24,560,000	0.75	0.79	0.00	0.00
		Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Formal	-	0	3 Sekolah	31,000,000	0	0	3,000,000		4,500,000	-	24,560,000.00	0	24,560,000.00	0	24,560,000.00	0.00	0.79	0.00	0.00
	Meningkatnya Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah yang Dipetakan	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan daerah yang Dipetakan	100	21,787,531		91,000,000	0		12,650,000		16,885,000	-	31,985,000	0	31,985,000	0	31,985,000	0.00	0.35	0.00	1.47
		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Data Keluarga yang Dicatat dan Dikumpulkan	36514 KK	5,000,000	40000 kk	65,000,000	0	0	2,900,000		2,900,000	-	7,730,000.00		7,730,000		7,730,000		0.12		1.55
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang Diolah dan Dilaporkan	15 Faskes	11,787,531	15 Faskes	26,000,000	0	0	15 Faskes 9,750,000	15 Faskes	13,985,000	15 Faskes	24,255,000.00	15 Faskes	24,255,000	15 Faskes	24,255,000	1.00	0.93	1.00	2.06
7	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang program banggakenca na	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (%)	80.50	3,269,089.451		3,810,695,000	0		198,205,253		997,453,900	-	2,531,103,263		2,531,103,263		2,531,103,263		0.66		0.77

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang program banggakenca na	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Peresentase Pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB	100	941,689,451	100	986,170,000	0	0	50	39,168,253	65	373,857,400	75	848,345,463	75	848,345,463	75	848,345,463	0.65	0.86	0.75	0.90
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Media Massa Cetak dan Elektronik yang Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk Promosi dan KIE	2	61,689,451	11 Kecamatan	168,562,000	0	0	25,481,500	69,272,000	-	141,001,800.00	0	141,001,800	0	141,001,800	0.00	0.84	0.00	2.29		
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai Penyuluhan KKBPK yang tersedia Pengelolaam Operasionalnya	11	250,000,000	11 Kecamatan	817,608,000	0	0	11 balai	13,686,753	11 balai	304,585,400	11 balai	707,343,663.00	11 balai	707,343,663	11 balai	707,343,663	100.00	0.87	100.00	2.83
Meningkatnya Kapasitas PKB/PLKB	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	744,400,000	100	1,239,701,500	0	0	148,200,000	75	429,523,000	100	952,465,000	100	952,465,000	100	952,465,000	100.00	0.77	1.00	1.28	
	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	1 laptop + 1 printer	20,000,000	11 Kecamatan	450,307,500	0	0	0	11 balai	136,123,000	-	173,065,000.00	11 balai	173,065,000	11 balai	173,065,000	1.00	0.38	1.00	8.65	
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Lapangan Petugas KB/ Penyuluh (PKB/PLKB)	11 kali	90,000,000	3 Paket	204,994,000	0	0	0	0	0	11 Kec.	195,000,000.00	11 Kec.	195,000,000.00	11 Kec.	195,000,000.00	1.00	0.95	1.00	2.17	
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang Digerakkan	474 org	584,400,000	88 Desa/Kelurahan	584,400,000	0	0	474 org	148,200,000	474 org	293,400,000	474 org	584,400,000.00	474 org	584,400,000	474 org	584,400,000	1.00	1.00	1.00	1.00

Meningkatnya Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten	100	1,113,000,000	100	911,575,500	0	50%	6,540,000	60%	87,242,500	75%	280,507,800	75%	280,507,800	75%	280,507,800	0.75	0.31	0.75	0.25	
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB yang Didistribusikan Ke Fasilitas Kesehatan (Faskes) termasuk Jaringan dan Jejaringnya	15 Faskes	90,000,000	15 Faskes	27,405,000	0	0	15 Faskes	3,540,000	15 Faskes	17,546,000	15 Faskes	21,476,000.00	15 Faskes	21,476,000	15 Faskes	21,476,000	1.00	0.78	1.00	0.24
	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang yang Ditingkatkan Kompetensinya	15 Orang	70,000,000	15 Faskes	8,250,000	0	0	0	0	0	-	750,000.00	0	750,000.00	0	750,000.00	0.00	0.09	0.00	0.01	
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Peserta KB yang Menggunakan MKJP	3690 PUS	198,000,000	11 Kecamatan	698,008,000	0	0	0	0	0	-	73,390,000.00	0	73,390,000.00	0	73,390,000.00	0.00	0.11	0.00	0.37	
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Sarana Penunjang Pelayanan KB yang tersedia	1 Gudang Alokon	80,000,000	1 Unit	121,912,500	0	0	0	0	0	63,940,000	-	140,790,300.00	0	140,790,300.00	0	140,790,300.00	0.00	1.15	0.00	1.76
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Pelayanan KB Bergerak	4 kali	160,000,000	11 Kecamatan	56,000,000	0	0	0	3,000,000	5,756,500	-	44,101,500.00	0	44,101,500.00	0	44,101,500.00	0.00	0.79	0.00	0.28	

	Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	90	160,000,000		673,248,000	0			4297000	106,831,000	-	449,785,000	0	449,785,000	0	449,785,000	0.00	0.67	0.00	2.81
		Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra kerja Lainnya yang Berperan Serta dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan kesertaan ber	7	60,000,000	3 kali	106,000,000	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Jumlah Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	11 Kec.	120,000,000	11 Kecamatan	567,248,000	0	0		4,297,000	106,831,000	-	449,785,000.00	0	449,785,000.00	0	449,785,000.00	0.00	0.79	0.00	3.75
8	Meningkatnya Keluarga Sejahtera	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan UPPKS) (%)		1,088,069,318		705,800,000	0			6,000,000	40,078,000	-	-	0	523,329,000	0	119,334,000	0.00	0.74	0.00	0.11
			BKB	0.74									-	-								
			BKR	0.61									-	-								
			BKL	0.62									-	-								
			PIK R	0.51									-	-								
			UPPKS	0.91									-	-								

	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,P PKS,PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	11 Kec	55,000,000	20 Desa/Kelurahan	615,800,000	0	0	0	0	11 Kec.	29,520,000	11 Kec.	433,515,000.00	11 Kec.	433,515,000.00	11 Kec.	29,520,000	100.00	0.70	100.00	0.54
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja															84.00%							

Benteng, Maret 2022
Kepala Dinas,

Drs. ANDI MASSAILE
NIP. 19650806 199402 1 003

Tabel T-C 29

Rekapitulasi hasil Pelaksanaan Renja DP3AP2KB dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023

Kabupaten Kepulauan Selayar

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja DP3AP2KB) tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun berjalan	
					Target Renja DP3A2KB tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja DP3A2KB tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021)/n-1)	Tingkat Capaian realisasi Target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Usuran Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dok.	6 dok.	7 dok.	7 dok.	100%	7 dok.	2000%	333%
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok.	-	-	-	-	1 dok.	-	-
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok.	-	-	-	-	1 dok.	-	-
	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok.	-	-	-	-	1 dok.	-	-

				5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok.	-	-	-	-	1 dok.	-	-
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Org	43 Org	43 Org	43 Org	100%	40 Org	12600%	307%
				2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18 Org	20 Org	20 Org	19 Org	95%	18 Org	5700%	317%
				3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap.	1 dok.	1 Lap.	1 Lap.	100%	1 Lap.	300%	300%
				4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	20 dok.	-	-	-	-	20 dok.	-	-
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
				1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 org	-	-	-	-	6 org	-	-
					Administrasi Umum Perangkat Daerah									
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	10 paket	1800%	450%
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	3 paket	3 paket	3 paket	100%	0 paket	600%	60%
				3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 jenis	2 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	5 jenis	1000%	333%
				4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis	600%	300%
				5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 org	-	-	-	-	1 Lap.	-	-

				1	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Perangkat Daerah	-	28 Perangkat Daerah	28 Perangkat Daerah	100%	-	0%	
				2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota	1 Dok.	-	1 Dok.	1 Dok.	100%	120 org	12000%	
					Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota									
				1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok.	-	1 Dok.	1 Dok.	100%	-	0%	
				2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kab/Kota	28 Ormas	-	28 Ormas	28 Ormas	100%	28 Ormas	2800%	
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									
				1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	1 organisasi Dharmawanita			1 organisasi Dharmawanita	#DIV/0!			

				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN									
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
			1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Penanganan bagi Perempuan Korban kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	25 Perangkat Daerah	-	28 Perangkat Daerah	28 Perangkat Daerah	100%	-	0%	
			2	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	1 dok.	-	1 dok.	1 dok.	100%	4 dok.	400%	
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA									
				Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
			1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kab/Kota	25 Perangkat Daerah	-	28 Perangkat Daerah	28 Perangkat Daerah	100%		0%	
			2	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lap.	-	1 Lap.	1 Lap.	100%		0%	

				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK								
				Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
			1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang	1 dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.	100%		0%
				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah dan dunia usaha di tingkat Kabupaten							
				Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota								
			1	Advokasi Kebijakan dan pendampingan pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan pendampingan pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan	10 Organisasi Pemerintah dan Swasta	-	10 Organisasi Pemerintah dan Swasta	10 Organisasi Pemerintah dan Swasta	100%	10 Organisasi Pemerintah dan Swasta	1000%
			2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dok.		1 dok.	1 dok.	100%	1 dok.	
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								

			1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8 dok.	-	1 dok.	-	0%	2 dok.	#DIV/0!		
			2	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dok.	-	1 dok.	1 dok.	100%		0%		
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK											
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
			1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 kec	-	30 anak	30 anak	100%	-	#VALUE!		
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK											
				Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk										
			1	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	0	-	2 SSK	2 SSK	0	0	0		

				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									
			1	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	0	0	0	
			2	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	15 dok.	15 dok.	15 dok.	15 dok.	100%	15 dok.	1500%	100%
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)										
				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal									
			1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	17 ormas dan stakeholder	-	17 ormas dan stakeholder	17 ormas dan stakeholder	100%	1 kali	100%	
			2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal		-	-	-		1 dok.	#DIV/0!	
			3	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2 dok.	2 dok.	2 dok.	2 dok.	100%	3 dok.	300%	
			4	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	11 Lap.	-	11 Lap.	11 Lap.	100%	11 Lap.	1100%	

				5	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPB	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	11 Lap.	11 Lap.	11 Lap.	11 Lap.	-			
					Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)									
				1	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	11 balai	11 balai	11 balai	11 balai	100%	11 balai	1100%	
				2	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPB untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	11 lap.	-	11 lap.	11 lap.	100%	-	#VALUE!	
				3	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	474 kader	474 kader	474 kader	474 kader	100%	474 kader	47400%	100%
					Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota									
				1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	15 Lap.	15 Lap.	15 Lap.	15 Lap.	100%	15 Lap.	1500%	
				2	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB		-	-	-	#VALUE!	15 faskes	#VALUE!	

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Kepulauan Selayar

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Keluarga Berencana/Keluarga Sejahtera	Kecamatan Pasimasunggu Timur	Meningkatkan sarana prasaran penyuluhan KB		
-	Penempatan Tenaga Penyuluhan KB	Desa Bontojati			
-	Penimbunan Halaman Kantor Penyuluh KB Kec. Pasimasunggu Timur	Desa Ujung			
-	Pembangunan Sumur Kampung KB Dusun Pandang Timur	Desa Bontobulaeng			
-	Peningkatan Kesejahteraan PPKBD dan Sub PPKBD	Desa Ujung, Bontobulaeng dan Bontobaru			
2	Pelatihan Bina Keluarga Balita (BKB)	Dusun Lembang Bau Desa Bonea Makmur	Meningkatkan pengetahuan kader BKB dan tenaga kesehatan	1 Paket	

RENCANA KERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolak Ukur		Target				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										6,298,213,976			5,758,819,576
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2,626,023,840			2,957,023,840
2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										52,023,840			55,023,840
2	08	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah dengan alokasi anggaran	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Dokumen	tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah, dengan alokasi anggaran	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000
2	08	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6,000,000
2	08	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6,000,000
2	08	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7,000,000
2	08	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7,000,000

2	08	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14,023,840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				14,023,840
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1,131,200,000					1,560,200,000
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Capaian Kinerja Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43 Orang/bu	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1,071,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi				1,500,000,000
2	08	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Capaian Kinerja Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Dokumen	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi				25,200,000
2	08	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Capaian Kinerja Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000
2	08	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Dokumen	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	10,000,000					10,000,000
2	08	01	2.02	07	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Capaian Kinerja Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se	10,000,000					10,000,000
2	08	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Capaian Kinerja Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kepulauan Selayar,	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi				0

2	08	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										175,000,000					205,000,000
2	08	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Kepulauan Selayar	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi					0
2	08	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43 Paket	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi					80,000,000
2	08	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21 Dokumen	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi					25,000,000
2	08	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kepulauan Selayar,	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi					0
2	08	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Orang	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi					50,000,000
2	08	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43 Orang	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi					50,000,000
2	08	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										466,000,000					370,000,000
2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 Paket	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					20,000,000
2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 Paket	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50,000,000						0

2	08	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Mebel	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Unit	Tersedianya Mebel	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0	
2	08	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Unit	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi					40,000,000	
2	08	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Benteng dan Kec. Pasilambena	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Unit	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi					0	
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								546,800,000							546,800,000
2	08	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Teraksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	Teraksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	90,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi					90,000,000	
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi					50,000,000	
2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	406,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi					406,800,000	
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								180,000,000							180,000,000
2	08	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84 Unit	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					100,000,000	

2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	29 Perangkat Daerah	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	38 Perangkat Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan	58,795,736						58,795,736
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota								85,000,000						85,000,000
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	2 Dokumen	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					40,000,000
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	35 Organisasi	Meningkatnya Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					45,000,000

2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota							85,000,000					85,000,000	
2	08	02	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	5 Orang	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				40,000,000
2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Tersedianya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	2 Dokumen	Tersedianya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				45,000,000
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							1,178,400,024					1,078,000,000	
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							200,000,000					100,000,000	
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Perlindungan Perempuan	2 Dokumen	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0

2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Perlindungan Perempuan	29 Perangkat Daerah	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					100,000,000
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota								278,400,024						278,000,000
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Perlindungan Perempuan	15 Orang	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					150,000,000
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Perlindungan Perempuan	4 Layanan	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	128,400,024	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					128,000,000
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								700,000,000						700,000,000
2	08	03	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Perlindungan Perempuan	3 Dokumen	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					100,000,000

2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Perlindungan Perempuan	5 Orang	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				200,000,000		
2	08	03	2.03	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Tersedianya Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Perlindungan Perempuan	5 Orang	Tersedianya Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				150,000,000		
2	08	03	2.03	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Perlindungan Perempuan	8 Dokumen	Terlaksananya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				250,000,000		
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							157,030,376							125,000,000	
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							65,889,200								65,000,000
2	08	04	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Keluarga yang Terstandarisasi	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Perlindungan Perempuan	29 Perangkat Daerah	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000		
2	08	04	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Keluarga yang Terstandarisasi	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Tersedianya Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Perlindungan Perempuan	2 Dokumen	Tersedianya Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15,889,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000		

2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Keluarga yang Terstandarisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Perlindungan Perempuan	1 Dokumen	Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,000,000
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota							75,000,000					40,000,000	
2	08	04	2.02	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Keluarga yang Terstandarisasi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Perlindungan Perempuan	1 Lembaga	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,000,000
2	08	04	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Keluarga yang Terstandarisasi	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Perlindungan Perempuan	5 Orang	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,000,000
2	08	04	2.02	03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Keluarga yang Terstandarisasi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan	Terlaksananya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Perlindungan Perempuan	1 Dokumen	Terlaksananya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota							16,141,176				20,000,000		
2	08	04	2.03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Keluarga yang Terstandarisasi	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Tersedianya Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Perlindungan Perempuan	1 Layanan	Tersedianya Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	16,141,176	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,000,000

2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK							152,964,000					160,000,000	
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							152,964,000					160,000,000	
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Sistem Informasi Gender dan Anak	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Tersedianya Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak	30 Dokumen	Tersedianya Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	52,964,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi				60,000,000
2	08	05	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Sistem Informasi Gender dan Anak	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan	Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak	12 Dokumen	Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi				100,000,000
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							1,230,000,000					830,000,000	
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota							250,000,000					250,000,000	
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pemenuhan Hak Anak (%) (skor indikator KLA)	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	5 Organisasi	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi				150,000,000
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pemenuhan Hak Anak (%) (skor indikator KLA)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	5 Dokumen	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi				100,000,000
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota							980,000,000					580,000,000	
2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pemenuhan Hak Anak (%) (skor indikator KLA)	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	100 Orang	Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi				100,000,000

2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pemenuhan Hak Anak (%) (skor indikator KLA)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	5 Dokumen	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah	130,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				130,000,000
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pemenuhan Hak Anak (%) (skor indikator KLA)	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	2 Dokumen	Tersedianya Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				200,000,000
2	08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pemenuhan Hak Anak (%) (skor indikator KLA)	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	6 Dokumen	Terlaksananya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				150,000,000
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK								535,000,000					240,000,000
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								100,000,000					100,000,000
2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Prerindungan Khusus Anak	29 Perangkat Daerah	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50,000,000
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Prerindungan Khusus Anak	1 Dokumen	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50,000,000

2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							350,000,000					100,000,000		
2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kab/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Prerindungan Khusus Anak	100 Orang	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kab/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Pendampingan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Prerindungan Khusus Anak	50 Layanan	Tersedianya Pendampingan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					100,000,000
2	08	07	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kab/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Prerindungan Khusus Anak	2 Dokumen	Tersedianya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0
2	08	07	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Prerindungan Khusus Anak	1 Dokumen	Terlaksananya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0

2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							85,000,000					40,000,000		
2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Prerindungan Khusus Anak	2 Dokumen	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0
2	08	07	2.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Prerindungan Khusus Anak	1 Dokumen	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					40,000,000
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							3,687,038,000					4,487,469,000		
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK							870,000,000					600,000,000		
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk							605,000,000					310,000,000		
2	14	02	2.01	01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Terlaksananya Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Pengendalian Penduduk	1 Dokumen	Terlaksananya Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					150,000,000
2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Pengendalian Penduduk	2 Dokumen	Terlaksananya Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	350,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0

2	14	02	2.01	03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Terlaksananya Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Pengendalian Penduduk	11 Dokumen	Terlaksananya Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50,000,000
2	14	02	2.01	04	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Terlaksananya Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Pengendalian Penduduk	11 Dokumen	Terlaksananya Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	25,000,000					25,000,000
2	14	02	2.01	09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Pengendalian Penduduk	2 Satuan Pendidikan	Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				35,000,000
2	14	02	2.01	10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan	Terlaksananya Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Pengendalian Penduduk	2 Laporan	Terlaksananya Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana				50,000,000
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								265,000,000					290,000,000
2	14	02	2.02	03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Tersusunnya Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Pengendalian Penduduk	1 Dokumen	Tersusunnya Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi				35,000,000
2	14	02	2.02	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBP di Sektor Lain	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang	Dibentuknya Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBP di Sektor Lain	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Pengendalian Penduduk	2 Unit	Dibentuknya Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBP di Sektor Lain	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				25,000,000

2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Pengendalian Penduduk	11 Dokumen	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana				60,000,000
2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Pengendalian Penduduk	11 Laporan	Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana				75,000,000
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Pengendalian Penduduk	11 Dokumen	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50,000,000
2	14	02	2.02	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Pengendalian Penduduk	11 Laporan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				45,000,000
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								1,836,434,000					2,684,709,000
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal								337,375,000					1,141,600,000
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	12 Organisasi	Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4,375,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				40,000,000

2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2 Dokumen	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	25,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				40,000,000
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4 Dokumen	Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	46,400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				50,000,000
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	11 Laporan	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	171,600,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				171,600,000
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	11 Laporan	Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				800,000,000

2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	40,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				40,000,000
2	14	03	2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)									431,400,000				450,000,000	
2	14	03	2.02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				0
2	14	03	2.02	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	474 Orang	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	431,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer				450,000,000

2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota								441,909,000					467,359,000	
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	17 Laporan	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	6,750,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					25,000,000
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4224 Orang	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	247,359,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					247,359,000
2	14	03	2.03	07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Terlaksananya Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	50 Orang	Terlaksananya Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	20,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					25,000,000
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17 Laporan	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	7,800,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					10,000,000
2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 Laporan	Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					80,000,000

2	14	03	2.03	12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Terlaksananya Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Orang	Terlaksananya Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				80,000,000	
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB							625,750,000							625,750,000
2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	TerIntegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1 Dokumen	TerIntegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				80,000,000	
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPB di Kampung KB	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	27 Kampung	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	465,750,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				465,750,000	
2	14	03	2.04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Terlaksananya Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	27 Laporan	Terlaksananya Pembinaan Terpadu Kampung KB	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				80,000,000	

2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							980,604,000					1,202,760,000	
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							800,604,000					967,760,000	
2	14	04	2.01	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan	Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	5 Kelompok	Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100,000,000
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2 Unit	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				100,000,000
2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1 Laporan	Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50,000,000

2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	35 Orang	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tersedianya Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	4247 Orang	687,760,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				687,760,000
2	14	04	2.01	06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tersedianya elompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Kep	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		0	DAK Non Fisik-BOKB-KB				0
2	14	04	2.01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kab. Kepulauan Selayar	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		0	DAK Non Fisik-BOKB-KB				0

2	14	04	2.01	10	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan UPPKS)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi (iBangga Indeks Pembangunan Keluarga)	Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi (iBangga Indeks Pembangunan Keluarga)	Kab. Kepulauan Selayar	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi (iBangga Indeks Pembangunan Keluarga)	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	14	04	2.01	12	Sosialisasi IPK	Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan UPPKS)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Terlaksananya Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	15 Orang	Terlaksananya Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	12,844,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	14	04	2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga									180,000,000					235,000,000
2	14	04	2.02	01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	25 Organisasi	Terlaksananya Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				60,000,000

2	14	04	2.02	02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (KKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan	Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (KKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan	Terlaksananya Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (KKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	11 Laporan	Terlaksananya Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (KKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100,000,000
2	14	04	2.02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Terlaksananya romosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1 Laporan	Terlaksananya romosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				75,000,000
TOTAL												9,985,251,976				10,246,288,576		

Benteng, Maret 2022
Kepala Dinas,

Drs. ANDI MASSALE
NIP. 19650806 199402 1 003